

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ali Achmad Chomza, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahannya*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)
- Arif Budiman, *Fungsi Tanah dan Kapitalis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Benny Bosi, *Perkembangan Terbaru Sertifikat*, (Jakarta: Departemen Pekerja Umum, 1997)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- _____, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016)
- _____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/200*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002)
- G Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)
- H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015)
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Elsam, 1997)
- Herman Hermit, *Teknik Penaksiran Harga Tanah Perkotaan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009)
- Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014)
- J. Andy Hertanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Maria S.W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008)
- _____, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1982)
- Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009)
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Alumni, 1999)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008)
- Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018)
- Sunnindhia Y.W dkk, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988)
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015)
- _____, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010)
- Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum Informasi Menyesatkan (Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public*, (Karawaci: FH-UPH, 2018)
- Zaidar, *Dasar Filosofis Agraria Indonesia*, (Jakarta: Medan Pustaka Bangsa Press, 2004)
- Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996)

JURNAL

- Edi Rohaedi, dkk, "Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Hukum* Vol. 5, No.1 Januari-Juni 2019. 202. DOI : <https://doi.org/10.33751/v5i2.1192>
- Happy Trizna Wijaya, "Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat", *Jurnal* Vol. 12, No. 1 Februari-Juli 2020. 109. DOI: <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3040>
- Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 2 Agustus 2016. 449. DOI : <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762>
- Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2 September 2020. 216. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2478.213-217>
- Mudjiono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 3 Juli 2007. 464. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6>
- Mukadir Iskandar Syah, "Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan", *Jurnal Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma* Vol. 4, No. 2 Maret 2014. 49. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97>

HASIL PENELITIAN

- Azam, Syaiful. “Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria”. Makalah Fakultas Hukum USU- Digitized by USU Digital Library, 2003.
- Kepustakaan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007
- Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Property, *Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Hotel A One Jakarta, 13-14 Juni 2016.
- Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Property, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI), 2016.
- Sumarto. “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”. Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri Republik Indonesia, 19 September 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor Putusan Nomor:
18/Pdt.G/2019/PN.Nab
Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor Putusan Nomor:
35/Pdt/2020/PT.JAP

WEBSITE

KBBI Daring, “Sertifikat”, <https://kbbi.web.id/sertifikat> , diakses pada 1 September 2021

